

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SEKOLAH LANSIA TANGGUH DI DESA KEBUNTEMU KECAMATAN PETERONGAN KABUPATEN NGANJUK

***Rizki Effendi¹⁾, Teguh Pramono²⁾, Imam Fachrudin³⁾**

1), 2), 3) Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri, Indonesia

*Email Korespondensi : rizki.efendi.st@gmail.com

Submitted: 16-10-2024 | Accepted: 22-05-2025 | Published: 23-05-2025

<p>Kata Kunci: Kebijakan Publik; Implementasi Kebijakan Publik; Bina Keluarga Lansia; Sekolah Lansia Tangguh</p>	<p>Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan program sekolah lansia tangguh di desa kebuntemu kecamatan peterongan kabupaten nganjuk serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, berfokus pada Sekolah Lansia Tangguh BKL Dahlia. Informan kunci ditentukan dengan teknik purposive sampling, sementara sumber data dipilih menggunakan teknik snowball sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Hubermans. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program ini sudah berjalan cukup baik. Evaluasi dilakukan berdasarkan enam aspek: tujuan kebijakan yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004, kecukupan sumber daya, karakter organisasi pelaksana yang positif, sikap pelaksana yang mendukung kebutuhan lansia, komunikasi yang efektif, serta dukungan lingkungan sosial dan ekonomi. Faktor pendukung utama adalah keterlibatan pemangku kepentingan, sementara hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya komunikasi dengan pemerintah desa dan keterbatasan alokasi dana desa untuk program ini.</p>
<p>Keywords: Public Policy; Public Policy Implementation; Elderly Family Development; Resilient Elderly School</p>	<p>Abstract <i>This study aims to describe and analyze the implementation of the resilient elderly school program policy in Kebuntemu Village, Peterongan Subdistrict, Nganjuk Regency, as well as to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. The research employs a qualitative method with a descriptive analytical approach, focusing on the Resilient Elderly School BKL Dahlia. Key informants were selected using purposive sampling, while data sources were chosen through snowball sampling techniques. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The results indicate that the program implementation has been running quite well. The evaluation was conducted based on six aspects: policy objectives aligned</i></p>

with Government Regulation No. 43 of 2004, adequacy of resources, positive characteristics of the implementing organization, implementers' attitudes supporting the needs of the elderly, effective communication, and support from social and economic environments. The main supporting factor is the involvement of stakeholders, while the obstacles faced include limited communication with the village government and restricted allocation of village funds for the program.

PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi peningkatan jumlah penduduk yang signifikan, hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kualitas kesehatan dan harapan hidup. Berdasarkan data sensus pada September 2020, populasi Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa, mengalami kenaikan sebesar 32,56 juta jiwa dibandingkan dengan sensus tahun 2010. Kepadatan penduduk tercatat mencapai 141 jiwa per km², sementara tingkat pertumbuhan penduduk mengalami penurunan menjadi 1,25%. Peningkatan jumlah lanjut usia menjadi isu penting dalam dinamika sosial, mengingat hal ini tidak hanya berdampak pada individu lansia, tetapi juga pada struktur keluarga dan komunitas (Rukmini et al., 2022). Pemerintah telah merespons perubahan demografis ini dengan berbagai kebijakan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap individu untuk memperoleh perlakuan khusus dan akses yang setara dalam mencapai keadilan sosial. Selain itu, Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 secara spesifik mengatur kesejahteraan lanjut usia, sementara Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mewajibkan pemerintah untuk menjaga kesehatan lansia agar tetap hidup sehat dan produktif, baik dalam ranah sosial maupun ekonomi. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam merespons dinamika sosial yang muncul akibat pertambahan jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia (Rifal & Sulaeman, 2016; Seftiani & Vibriyanti, 2020).

Permasalahan yang akan dihadapi menyangkut berbagai aspek, seperti aspek kesehatan, yang mencakup kesehatan fisik, psikologis, sosial dan juga ekonomi. Permasalahan ini terkait dengan proses penuaan usia seseorang dimana akan mengalami penurunan fungsi dari bentuk fisik, motorik, mental, minat dan berkehidupan berkeluarga. Akibatnya para lanjut usia ini tidak dapat menjalankan aktifitasnya dengan

optimal dan menyebabkan daya tahan tubuh mereka pun ikut melemah lambat launnya (Pangestuti, 2019).

Ditengah kondisi penurunan fungsi tubuh mereka, tentunya lanjut usia pasti membutuhkan pihak lain untuk membantu mereka agar dapat menyesuaikan diri dengan kemampuan mereka yang ada. Pihak yang paling dekat lanjut usia adalah pihak keluarga. Namun bantuan dari keluarga ini juga tidak serta merta dilaksanakan begitu saja, mereka harus mengantongi pengetahuan yang cukup untuk mengatasi kondisi lanjut usia yang memiliki banyak kekurangan dan mengatasi permasalahan penduduk lanjut usia.

Problematisasi dalam kesejahteraan sosial masyarakat di Indonesia merupakan tanggungjawab bersama dari masyarakat maupun pemerintah. Kerumitan permasalahan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat tersebut sampai saat ini belum terurai dengan baik. Pada sisi pemerintah, keberhasilan pemerintah dalam memberikan kebijakan yang mendukung kesejahteraan lansia nampak pada kemajuan beberapa sektor Kesehatan dan keluarga berencana. Dampak dari kemajuan tersebut adalah adanya peningkatan struktur umur penduduk dengan makin meningkatnya jumlah dari para lansia yang ada di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, pasal 1 “lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia antara 60 tahun keatas.” Lansia merupakan periode terakhir dalam fase kehidupan seseorang. Dalam perkembangannya, para lansia mengalami perubahan dari berbagai sisi baik jiwa, fisik, biologi dan sosial. Perubahan para lansia tersebut merupakan memberikan dampak pada seluruh aspek dalam kehidupannya. Maka dalam hal ini pemerintah dan masyarakat sekitar wajib memberikan perhatian penuh dalam upayanya memberikan kehidupan yang produktif yang menyesuaikan dengan kondisi lansia sehingga turut berperan aktif dalam pembangunan diri (Rangkoly et al., 2014).

Salah satu lokasi penelitian yang dipilih adalah Kabupaten Jombang. Berdasarkan Pendataan Keluarga Kabupaten Jombang Tahun 2021, jumlah lansia di wilayah tersebut mencapai 142.995 jiwa. Jumlah lansia ini dapat menjadi fenomena yang memerlukan perhatian serius, karena bisa menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak positif terjadi ketika lansia tetap produktif, sehat, dan aktif. Namun, dampak negatif dapat muncul jika lansia menghadapi masalah kesehatan, kesulitan ekonomi, dan

kurangnya dukungan sosial. Oleh karena itu, penting bagi lansia untuk mendapatkan berbagai aspek kehidupan yang didukung oleh pemerintah serta masyarakat sekitarnya.

Kesejahteraan lansia menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan bahwa pengendalian penduduk merupakan salah satu cara peningkatan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satu bentuk penanganan sumber daya manusia adalah dengan memberikan porsi perhatian lebih pada penduduk lansia yang besar. Perhatian besar tersebut merujuk pada beban pembangunan yang di sematkan pada para lansia apabila mereka tidak di berdayakan dengan meningkatkan produktivitas dan aktivitas mereka.

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia telah disebutkan bahwa “lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi: (a) pelayanan keagamaan dan spiritual; (b) pelayanan kesehatan; (c) pelayanan kesempatan kerja; (d) pelayanan pendidikan dan pelatihan; (e) pemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; (f) kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial dan bantuan sosial.” (Purwanto & Sulistyastuti, 2021)

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah salah satu Lembaga non kementerian yang langsung di beri tanggungjawab kepada presiden untuk mengatur perkembangan jumlah penduduk, salah satu program yang dibuat adalah program Bina Keluarga Lansia. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan keluarga agar hidup sejahtera dan bahagia. Lingkup pelaksanaan dari program ini terstruktur dari mulai.

Desa Kebontemu merupakan salah satu desa di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Jumlah penduduk Desa Kebontemu berdasarkan Pendataan Keluarga Tahun 2021 sebanyak 2.605 jiwa atau 781 Kepala Keluarga yang memiliki lansia sebanyak 133 Kepala Keluarga dengan jumlah keseluruhan lansia sebanyak 209 orang. Secara administratif Desa Kebontemu terbagi menjadi 3 Dusun, 4 RW dan 20 RT dengan luas wilayah permukiman 1,68 Km².

Desa Kebontemu merupakan salah satu desa yang menjadi tempat sasaran BKKBN untuk menjalankan programnya. Beberapa program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang dijalankan di Desa Kebontemu

salah satunya adalah Program Bina Keluarga Lansia dengan sebutan Bina Keluarga Lansia (BKL) Dahlia.

Desa Kebontemu terdapat Sekolah Lansia Tangguh yang di selenggarakan oleh BKL Dahlia. Desa Kebontemu menjadi salah satu pilot project Sekolah Lansia di Kabupaten Jombang. Sekolah Lansia Tangguh BKL Dahlia Desa Kebontemu sebagai wadah kegiatan bagi lansia untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan lansia, terkait kesehatan fisik, kehidupan sosial dan ekonomi, serta lingkungan. Dalam implementasinya, BKL Dahlia mampu memberdayakan dan mensejahterakan Lansia dengan berbagai programnya salah satunya adalah sekolah lansia tangguhnya dengan presentase kehadiran mencapai 100%. Berdasarkan beberapa deskripsi yang telah di jelaskan di atas, maka Peneliti tertarik untuk membahas tentang *“implementasi kebijakan program sekolah lansia tangguh di desa kebontemu kecamatan peterongan kabupaten nganjuk”*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, di mana data yang terkumpul akan muncul dalam bentuk kata dan gambar, bukan angka (Sugiyono, 2018; Usman et al., 2017). Peneliti menetapkan lokasi penelitian yang dilakukan secara sengaja yaitu di Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Pemilihan lokasi ini karena di Bina Keluarga Lansia (BKL) Dahlia Desa Kebontemu terdapat Sekolah Lansia Tangguh BKL Dahlia Desa Kebontemu. Dalam penelitian ini, akan difokuskan pada penerapan teori implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn mengenai implementasi kebijakan sebagai titik berat yang meliputi: Tujuan Kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi/sikap para pelaksana, dan lingkungan ekonomi dan social (Dunn, 2017; Purwanto & Sulistyastuti, 2021; Silalahi, 2018). Sumber data dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat sekolah BKL DAHLIA di Desa Kebontemu. Penelitian ini memanfaatkan teknik purposive sampling untuk menentukan Informan kunci sementara sumber data dipilih menggunakan teknik snowball sampling. Informan penelitian meliputi: Wali kelas, ketua kelas, sekretaris kelas, bendahara kelas, dan 2 peserta kelas lansia Tangguh. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penggambaran kondisi penelitian ini meliputi semua jawaban wawancara dari seluruh informan dan akan di paduan dengan data observasi dan dokumentasi. Penelitian ini terdiri dari 4 tahap pengolahan data sesuai dengan teori Miles dan Huberman yang

meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi (Frederick et al., 1998; Moleong, 2017; Nugroho, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Program Sekolah Lansia Tangguh di Desa Kebuntemu Kecamatan Peterongan Kabupaten Nganjuk

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan Sasaran Kebijakan Penerapan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2004 Melalui Program Sekolah Lansia Tangguh Di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang yakni memberikan kesejahteraan sosial bagi seluruh lansia potensial maupun lansia non potensial.

Berdasarkan wawancara dan observasi standar yang diberikan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan pasal 24 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah Penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia pada sarana dan prasarana umum dapat berbentuk:

a) Fisik

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi: aksesibilitas pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan tempat rekreasi serta aksesibilitas pada angkutan umum.

b) Non Fisik

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi pelayanan informasi dan pelayanan khusus.

Sedangkan sasaran peserta dari Sekolah Lansia di kelompok BKL (SL-BKL) yaitu pada usia pralansia (45-59 tahun) dan Lansia (60 tahun ke atas), namun berdasarkan tingkat kemandirian/ketergantungan secara utuh dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi yaitu sebagai berikut:

- a) Peserta didik masih mandiri Yaitu peserta dengan ketergantungan ringan/mandiri (skor ADL 12-20). Pembelajaran yang dilakukan adalah Tujuh Dimensi Lansia Tangguh/Kesejahteraan (spiritual, intelektual, fisik, emosional, sosial, vokasional dan lingkungan).

- b) Peserta didik sudah membutuhkan pendampingan Yaitu peserta dengan ketergantungan sedang (skor ADL 9-11) dan ketergantungan berat (skor ADL 5-8/total 0-4). Pembelajaran yang dilakukan adalah pendampingan kegiatan sesuai dengan kondisinya berdasarkan 7 Dimensi Lansia Tangguh/Kesejahteraan (spiritual, intelektual, fisik, emosional, sosial, vokasional dan lingkungan)

2. Sumber Daya

a) Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan kebijakan efektif memerlukan adanya ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan kompetensi yang sesuai dengan tugas pekerjaan yang diberikan (Tangkilisan, 2017; Zuswana, 2021). Berdasarkan hasil pengumpulan data jajaran pengurus Sekolah Lansia Tangguh BKL Dahlia Desa Kebontemu Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang difragmentasi dalam 10 jabatan, Sedangkan pengajar yang ada di Sekolah Lansia Tangguh BKL Dahlia berjumlah 9 orang yang berasal dari Penyuluh KB Kecamatan Peterongan, Bidan Desa Kebontemu, Dinas PPKB PPPPA Kab Jombang, KUA Kecamatan Peterongan, Indonesia Ramah Lansia, dan Anggota DPRD Kab Jombang. Seluruh pengajar bergantian waktu mengajar selama 13 kali pertemuan dalam jangka waktu 6 bulan.

b) Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Program Sekolah Lansia Tangguh Di Desa Kebontemu Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang terbilang cukup memadai yaitu dengan tersedianya beberapa sarana dan prasarana yang mencakup 5 item yakni Laptop, LCD, Sound System, Kursi dan Meja. Sedangkan untuk prasarana untuk menunjang administrasi dan pembelajaran sekolah lansia adalah ruang pertemuan/pembelajaran, dan jaringan listrik yang memadai

c) Sumber Daya Finansial

Program Sekolah Lansia Tangguh Di Desa Kebontemu Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang memerlukan anggaran biaya sebesar Rp 1.500.000,00 untuk setiap sesi pembelajaran. Anggaran biaya tersebut berasal dari APBD Kabupaten Jombang dan di alokasikan untuk diberikan pada para lansia sebagai uang transportasi, sedangkan anggaran untuk konsumsi belum ada (belum dianggarkan)

d) Sumber Daya Waktu

Program Sekolah Lansia Tangguh yang diadakan di Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, dijadwalkan untuk berlangsung selama periode enam bulan, dengan total tiga belas kali pertemuan. Pertemuan-pertemuan ini dilaksanakan secara teratur pada hari Rabu, setiap minggu kedua dan minggu keempat dalam satu bulan. Dengan demikian, frekuensi pertemuan ini cukup konsisten, memberikan peserta lansia waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan materi yang diajarkan serta mempraktikkan keterampilan yang mereka pelajari di antara pertemuan.

Lebih lanjut, pengaturan jadwal yang konsisten ini memungkinkan para lansia, yang mungkin memiliki keterbatasan dalam mobilitas atau waktu, untuk menyesuaikan diri dengan kegiatan rutin yang tidak terlalu padat. Adanya jeda waktu antara pertemuan memberikan kesempatan bagi para peserta untuk merenungkan materi yang telah diajarkan, melakukan praktik secara mandiri, atau bahkan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk dibahas dalam pertemuan berikutnya.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan atau kegiatan sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan sifat dari organisasi pelaksana. Organisasi ini dapat berupa organisasi formal maupun informal, yang keduanya memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan public (Mulia Astuti et al., 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, karakter organisasi pelaksana, khususnya para pengurus dan pengajar Program Sekolah Lansia Tangguh Di Desa Kebontemu menunjukkan sikap baik, mengayomi, serta penuh perhatian yang mampu menciptakan lingkungan mendukung bagi para lansia, sehingga mereka merasa nyaman dan bersemangat untuk terus belajar. Ini terlihat jelas dalam tingkat kehadiran yang tinggi, yang selalu di atas 100% selama 13 kali pertemuan yang telah dilaksanakan.

4. Sikap Atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana

Pelaksanaan Program Sekolah Lansia Tangguh di Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, disposisi atau sikap para pelaksana program terpantau cukup positif. Para pelaksana, termasuk pengajar, menunjukkan sikap yang baik dan penuh pengertian terhadap para lansia yang menjadi peserta program. Mereka menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan dengan sungguh-sungguh dan memahami kondisi serta kebutuhan para lansia dengan baik.

Sikap yang positif ini terlihat dari partisipasi aktif yang ditunjukkan oleh para pengajar dan juga lansia selama proses pembelajaran berlangsung. Para pengajar secara konsisten hadir dan menjalankan peran mereka dalam memberikan materi, sedangkan para lansia juga turut bersemangat mengikuti setiap sesi pembelajaran di Sekolah Lansia Tangguh. Tingkat kehadiran yang tinggi dari kedua belah pihak ini menjadi bukti nyata bahwa pelaksanaan program berjalan dengan baik, didukung oleh sikap yang mendukung dari para pelaksana di lapangan. Disposisi yang positif ini mendukung keberlangsungan program dan memastikan bahwa tujuan dari program, yaitu memberikan manfaat kepada para lansia, dapat tercapai dengan baik

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pelaksanaan Program Sekolah Lansia Tangguh di Desa Kebontemu menunjukkan bahwa hampir tidak ada kesalahpahaman yang terjadi di antara pihak-pihak yang terlibat. Ini menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi yang dibangun selama pelaksanaan program sudah berjalan dengan baik. Semua pihak telah berperan secara aktif dalam menjaga alur komunikasi tetap terbuka dan jelas, sehingga tidak ada informasi penting yang terlewatkan atau disalahpahami.

Namun, meskipun secara umum komunikasi dalam program ini berjalan lancar, ada satu kesalahpahaman yang sempat terjadi. Kesalahpahaman tersebut terjadi antara pengurus program dan pihak pemerintah desa terkait penyediaan konsumsi bagi para peserta lansia selama pertemuan pengajaran.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Program Sekolah Lansia Tangguh di Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, didukung oleh koordinasi dan komunikasi yang baik. Hal ini berperan penting dalam memastikan program dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. Meskipun ada kesalahpahaman kecil yang terjadi, program tetap dapat berlanjut tanpa hambatan berarti, berkat usaha bersama semua pihak yang terlibat dalam menjaga alur komunikasi yang terbuka dan efektif

6. Lingkungan Ekonomi dan Sosial

Lingkungan sosial masyarakat Desa Kebontemu sangat mendukung adanya Program Sekolah Lansia Tangguh di Desa Kebontemu Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Masyarakat setempat, keluarga lansia, dan organisasi masyarakat

banyak yang berpartisipasi dalam kegiatan Sekolah Lansia Tangguh ini. Dengan adanya dukungan dari masyarakat sekitar, para lansia merasa menjadi lebih aktif dan merasa lebih dihargai, serta membantu lansia tetap aktif dan terlibat dalam masyarakat.

Lingkungan ekonomi masyarakat Desa Kebontemu khususnya para lansia peserta Sekolah Lansia Tangguh kurang baik, rata-rata para lansia ini tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap. Tetapi para lansia sangat antusias untuk mengikuti kegiatan Program Sekolah Lansia Tangguh karena di sekolah lansia tangguh ini diberikan pelatihan-pelatihan keterampilan hidup yang bisa memberikan penghasilan tambahan untuk lansia dan keluarganya. Selain itu peserta sekolah Lansia Tangguh ini juga menerima uang transport sebesar 50 (lima puluh ribu) ribu rupiah untuk setiap pertemuan sehingga ini bisa memperbaiki perekonomian lansia dan keluarganya

Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Program Sekolah Lansia Tangguh di Desa Kebontemu Kecamatan Peterongan Kabupaten Nganjuk

1. Faktor Penghambat

Faktor Penghambat dalam proses Implementasi Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2004 Melalui Program Sekolah Lansia Tangguh Di Desa Kebontemu Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang adalah Kurangnya komunikasi antara stakeholder dengan pemerintah desa mengenai alokasi anggaran dan pemesanan snack yang diberikan kepada para lansia yang datang. Namun di tengah silang komunikasi tersebut, para lansia tetap mendapatkan snack pada setiap pertemuan pembelajaran.

Faktor penghambat lainnya adalah Belum adanya alokasi dana desa untuk Sekolah Lansia Tangguh. Anggaran konsumsi Sekolah Lansia Tangguh masih mengandalkan konsep patungan yang di ambil dari biaya transport yang di berikan pada para lansia. Jika ada posyandu lansia, baru biaya konsumsi akan di bebaskan pada anggaran posyandu lansia tersebut tanpa harus ada patungan transport para lansia

2. Faktor Pendukung

Faktor Pendukung dari implementasi Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2004 Melalui Program Sekolah Lansia Tangguh Di Desa Kebontemu Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang meliputi dukungan dari para stakeholder sangat menentukan dalam jalannya Sekolah Lansia Tangguh. Seluruh perangkat sekolah baik pengajar, pengurus dan para lansia menjalankan perannya dengan baik.

Selain itu adanya dukungan dari Lingkungan masyarakat sekitar pelaksanaan Program Sekolah Lansia Tangguh di Desa Kebontemu. Hal ini sesuai dengan tujuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, yang salah satu tujuannya adalah memberikan perhatian khusus kepada lansia dengan tetap dipelihara dan ditingkatkan agar selama mungkin dapat hidup secara produktif sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat ikut serta berperan aktif dalam pembangunan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Sekolah Lansia Tangguh di Desa Kebontemu Kecamatan Peterongan Kabupaten Nganjuk berjalan relatif baik. Program ini telah memenuhi standar kebijakan, dengan akses yang baik bagi para lansia serta didukung oleh sumber daya manusia, sarana prasarana, finansial, dan waktu yang memadai. Karakteristik organisasi pelaksana juga menunjukkan sikap yang positif, mengayomi lansia selama proses pembelajaran, serta didukung oleh komunikasi yang lancar antara pengurus, pengajar, dan peserta. Lingkungan ekonomi dan sosial yang mendukung juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini. Namun, hambatan dalam implementasi termasuk kurangnya komunikasi antara pemangku kepentingan dengan pemerintah desa dan belum adanya alokasi dana desa untuk program ini. Faktor pendukung utama adalah dukungan kuat dari stakeholder dan masyarakat sekitar.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Program Sekolah Lansia Tangguh di Desa Kebontemu, perlu adanya peningkatan komunikasi yang lebih intensif dan terstruktur antara pemangku kepentingan dengan pemerintah desa guna memastikan koordinasi dan sinkronisasi program berjalan dengan baik. Selain itu, alokasi dana desa yang memadai sangat diperlukan agar program dapat berlangsung secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak lansia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan bagi pengelola dan tenaga pengajar serta pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi hal penting untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran.

Selain itu, penguatan dukungan stakeholder dan masyarakat sekitar harus terus dilakukan melalui sosialisasi dan pemberdayaan agar partisipasi aktif mereka semakin

meningkat. Monitoring dan evaluasi berkala juga sangat disarankan untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang perbaikan dalam pelaksanaan program secara berkelanjutan. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan Program Sekolah Lansia Tangguh dapat lebih optimal dalam memberdayakan lansia dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat di Desa Kebuntemu.

REFERENSI

- Dunn, W. N. (2017). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi kedua*. Gajah Mada University Press.
- Frederick, W. C., Davis, K., & E, J. (1998). *Post. Business and Society, Corporate Strategy, Publik Policy, Ethics Sixth Edition*. McGraw-Hill Publishing Company.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulia Astuti, Sauqi, & Dina Ariani. (2015). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASISTENSI SOSIAL LANJUT USIA TELANTAR. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 5(1), 248–259.
- Nugroho, R. (2017). *Publik Policy*. Alex Media Komputindo.
- Pangestuti, B. (2019). Upaya Mewujudkan Lansia Tangguh Melalui Bina Keluarga Lansia'. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Nomor*, 3(9), 137–157.
- Purwanto, & Sulistyastuti. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasi Di Indonesia*. Gava Media.
- Rangkoly, I., Rumapea, P., & Dengo, S. (2014). Implementasi Kebijakan Bantuan Kesejahteraan Lanjut Usia di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 2(3).
- Rifal, & Sulaeman. (2016). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI DISTRIBUSI BERAS MISKIN (Implementasi Kebijakan Bantuan Kesejahteraan Lanjut Usia Di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat RASKIN) DI DESA TOLONGANO KECAMATAN BANAWA SELATAN KABUPATEN DONGGALA'. *AGROTEKBIS*, 4(5), 1–9.
- Rukmini, R., Tumaji, T., & Kristiana, L. (2022). Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 25(1), 19–31. <https://doi.org/10.22435/hsr.v25i1.5130>
- Seftiani, S., & Vibriyanti, D. (2020). Penyelenggaraan Program Bina Keluarga Lansia (Bkl) Di Wilayah Perkotaan: Potret Permasalahan Klasik'. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 15(1), 59. <https://doi.org/10.14203/jki.v15i1.533>
- Silalahi, U. (2018). *Metode Penelitian Sosial*. PT Revika Aditama.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat : Eksploratif, Enterpretatif, Interaktif Dan Konstruktif*. Alfabeta.
- Tangkilisan, H. N. S. (2017). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Geasindo.
- Usman, H., Akbar, & S, P. (2017). *Metode Penelitian Sosial*. PT Bumi Aksara.
- Zuswana, A. (2021). Evaluasi Implementasi Program Outsourcing Di PT Elnusa Petrofin'. *Sosio E-Kons*, 15(1), 90. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v15i1.16667>